



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SATUAN KREDIT PROFESI (SKP) SEBAGAI SARANA MENJAGA KUALITAS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Muda
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengamanatkan bahwa setiap tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) wajib memenuhi satuan kredit profesi (SKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas named dan nakes dapat terjamin. SKP adalah syarat penting untuk pengurusan surat izin praktik (SIP), yang wajib dipenuhi oleh named dan nakes dalam jangka lima tahun. Jumlah pemenuhan SKP masing-masing berbeda sesuai dengan profesinya. Sebagai gambaran draft kecukupan SKP 5 tahunan untuk named dan nakes dapat dilihat dari table 1. Target SKP tersebut saat ini masih menjadi pembahasan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tabel 1. Draft Kecukupan SKP untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Profesi	Draft Target SKP
Dokter	250
Dokter Gigi	100
Apoteker, Psikologi Klinis, Perawat, Bidan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan	50
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Ahli Teknologi, Laboratorium Medik, Fisioterapi Ahli Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi, Radiografer, Terapi Wicara, Ahli Gizi, Elektromedis, Akupuntur, Optometris, Promotor Kesehatan, Teknisi Pelayanan Darah, Okupasi Terapis	25

Sumber: Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes, 2024

Setelah disahkannya UU Kesehatan, pengurusan SKP bagi named dan nakes menjadi terintegrasi. Kecukupan SKP tidak lagi dikelola oleh masing-masing organisasi profesi melainkan secara terpusat oleh Menteri Kesehatan. Salah satu langkah untuk mewujudkan transformasi kesehatan sebagai amanat dari UU Kesehatan adalah adanya media yang terintegrasi, fleksibel, dan mudah diakses untuk named dan nakes. Terkait hal tersebut, pemerintah sudah meluncurkan berbagai media beberapa diantaranya terkait SKP yaitu SKP Platform dan Plataran Sehat.

SKP Platform merupakan situs web yang dirancang untuk memudahkan named dan nakes mencatat, mengelola, dan memantau portofolio SKP. Sedangkan Plataran Sehat merupakan media pembelajaran digital yang menawarkan solusi pembelajaran fleksibel sehingga setiap individu yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan keahliannya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu. Pelatihan yang ada dalam Plataran Sehat tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga memberikan kredit poin yang berguna untuk pengembangan karier. SKP tersebut dicatat secara digital dan terpusat.

Kedua media tersebut juga dapat mendeteksi praktik percaloan yang sempat terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Melalui media tersebut, Kemenkes berhasil mendeteksi praktik percaloan yang dilakukan oleh nakes yang berasal dari Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Karena alasan kesibukan dan proses yang instan, beberapa named dan nakes menggunakan jasa calo untuk memenuhi kecukupan SKP. Menggunakan jasa calo untuk mendapatkan SKP merupakan

praktik yang tidak etis dan dapat memiliki konsekuensi serius. Hal ini dapat merusak reputasi seseorang, menciptakan risiko hukum, dan merugikan profesi secara keseluruhan dengan merusak standar profesi. Disisi lain, SKP yang didapatkan melalui sistem pembelajaran berkala sangat penting untuk meningkatkan kompetensi demi keamanan pasien.

Atensi DPR

Dunia kesehatan terus berkembang membuat kebutuhan akan *named* dan *nakes* yang kompeten menjadi sangat penting. Terkait hal tersebut, SKP yang didapatkan melalui sistem pembelajaran berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan *named* dan *nakes* terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan perlu:

- 1.mengawasi dan memastikan langkah pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) kesehatan;
- 2.mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan terkait pengawasan SKP yang didalamnya memuat sanksi terhadap calo; dan
- 3.mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem media terkait SKP sehingga keamanannya lebih terjamin.

Melalui peran-peran tersebut, DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya peningkatan kualitas *named* dan *nakes* di Indonesia.

Sumber

kompas.id, 3 juni 2024;
nasional.tempo.co, 3 Juni 2024; dan
rri.co.id, 3 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.